



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**TAHUN 2019-2024**



**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

**Tahun 2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan KarunianNya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dapat tersusun tepat waktu.

Sebagai komitmen bersama atas pelaksanaan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya berdampak pada perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Biro Humas dan Protokol mengalami penambahan Fungsi dalam bidang Administrasi Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2024 merupakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017) yang akan menjadi pedoman dalam pencapaian Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun.

Demikian Rencana Strategis Renstra Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Biro Humas dan Protokol dalam upaya mewujudkan visi dan misi 5 (lima) tahun kedepan.

Surabaya, Mei 2019

**Kepala Biro Humas Dan Protokol**



**ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199511 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
	ii
DAFTAR ISI	
	1
BAB I     PENDAHULUAN	
1.1     Latar Belakang	1
1.2     Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3     Maksud dan Tujuan	4
1.4     Sistematika Penulisan	5
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	7
2.1     Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur	7
2.2     Sumber Daya Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur	11
2.3     Kinerja Pelayanan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur	14
2.4     Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur.	19
BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA TIMUR	21
3.1     Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jatim	21
3.2     Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3     Penentuan Isu-isu Strategis	26

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur Tabel TC. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur.	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
	Tabel TC 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	32
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	33
	Tabel TC 27 Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur	
BAB VII	PENUTUP	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekwensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip *good governance* ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampainya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekwensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Biro Humas dan Protokol mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan *stakeholders* lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran.

Demokrasi dengan bentuk pemilihan kepala pemerintahan (baik pusat maupun Daerah) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekuensi pada semakin tingginya tanggung jawab Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Gubernur, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap Visi, Misi dan program pembangunan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlunya komunikasi yang intensif dan aktif dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat. Sementara itu, di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 20 tahun, dan kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

Bentuk komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat luas dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui media lain, yaitu media masa. Besarnya peranan dan pengaruh media masa, apalagi dijamin teknologi informasi seperti sekarang ini, maka pemerintah harus dapat memanfaatkan peranan media masa ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi mitra yang efektif terhadap kegiatan komunikasi dua arah dan pencitraan pemerintah daerah.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, juga dapat menjadi media komunikasi, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang baik akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Mencermati perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diilustrasikan tersebut diatas, Biro Humas dan Protokol mengemban tugas untuk meningkatkan dan menjaga system komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan *stakeholders* lainnya tetap baik, meningkatkan citra yang baik dari masyarakat terhadap lembaga Pemerintah Provinsi, terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu Biro Humas dan Protokol juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan protokoler resmi Pimpinan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Tamu VVIP lainnya yang datang menjadi tamu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Biro Humas dan Protokol sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertanggungjawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Strategi Pembangunan tahun 2019 – 2024 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Timur yaitu **"Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong."**

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan;**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik. di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan dari Misi ke 3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur **“Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka dan Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”**. Rencana Strategis (Renstra) Biro



Humas dan Protokol tersusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Maksud penyusunan Renstra ini adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku jabatan dalam bidang Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terpadu dan berkesinambungan yang berdasarkan pada Misi ke 3 yaitu **“Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka dan Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”**.

Tujuan Penyusunan Renstra untuk memberikan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Biro Humas dan Protokol yang memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, Rencana Program / Kegiatan serta indikator dan Target Program / Kegiatan Biro Humas dan Protokol selama Enam tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 serta untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

##### **1. Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **2. Bab II Gambaran Pelayanan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Humas dan Protokol
- 2.2 Sumber Daya Biro Humas dan Protokol
- 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Humas dan Protokol
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Humas dan Protokol

- 3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur;**
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
  - 3.3 Telaahan Renstra Biro Humas dan Protokol.
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- 4. Bab IV Tujuan dan Sasaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;**
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Humas dan Protokol
- 5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**
- 6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- 7. Bab VII Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan**
- 8. Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sedangkan Tugas, Pokok dan Fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 86 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tugas Biro Humas dan Protokol adalah Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantapan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang hubungan masyarakat dan tugas-tugas keprotokolan.

Fungsi Biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Juru Bicara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kerjasama;
- c. pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi, protokol dan administrasi kerjasama;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi, protokol dan administrasi kerjasama;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kerjasama; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 (empat) Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**A. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi (PPI)**

Tugas Bagian PPI adalah menyiapkan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengumpulan, penyaringan data dan informasi serta melaksanakan urusan tata usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Biro;
2. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tentang pengumpulan dan penyaringan informasi;
3. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan penyaringan informasi;
4. pelaksanaan monitoring dan analisis pemberitaan media sebagai bahan pengambilan keputusan;
5. pelaksanaan penyusunan pusat data informasi kehumasan dan keprotokolan;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;

**B. Bagian Media dan Dokumentasi**

Tugas Bagian Media dan Dokumentasi adalah menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang media dan dokumentasi..

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Media dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa;
2. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa;
3. pelaksanaan koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah Provinsi melalui media massa;
4. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan perumusan kebijakan di bidang media, dokumentasi dan penerbitan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian media dan dokumentasi; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro;.

### **C. Bagian Protokol**

Tugas Bagian Protokol adalah menyiapkan, mengkoordinasikan, mengatur dan merencanakan pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, tata upacara, tata acara resmi, tata penghormatan, tata pelayanan tamu dan urusan undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Protokol mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang pelayanan keprotokolan di setiap acara resmi dan acara kenegaraan;
2. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan, serta penataan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
3. pelaksanaan penyiapan, pengaturan, penataan dan kelancaran kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi ;
4. pelaksanaan koordinasi dan pengaturan serta pelayanan acara penerimaan kunjungan tamu Pemerintah, Pejabat Negara dan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu negara/VVIP lainnya;
5. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non pemerintah di setiap acara resmi dan acara kenegaraan yang ada di Provinsi;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian protokol; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

### **D. Bagian Administrasi Kerjasama**

Bagian Administrasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidangbidang lain sesuai kebutuhan daerah;

2. penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidangbidang lain sesuai kebutuhan daerah;
4. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dengan provinsi lain dan dengan lembaga dalam negeri;
5. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pimpinan/anggota DPRD;
6. pelaksanaan fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan/anggota DPRD, Bupati/Walikota dan pimpinan/anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

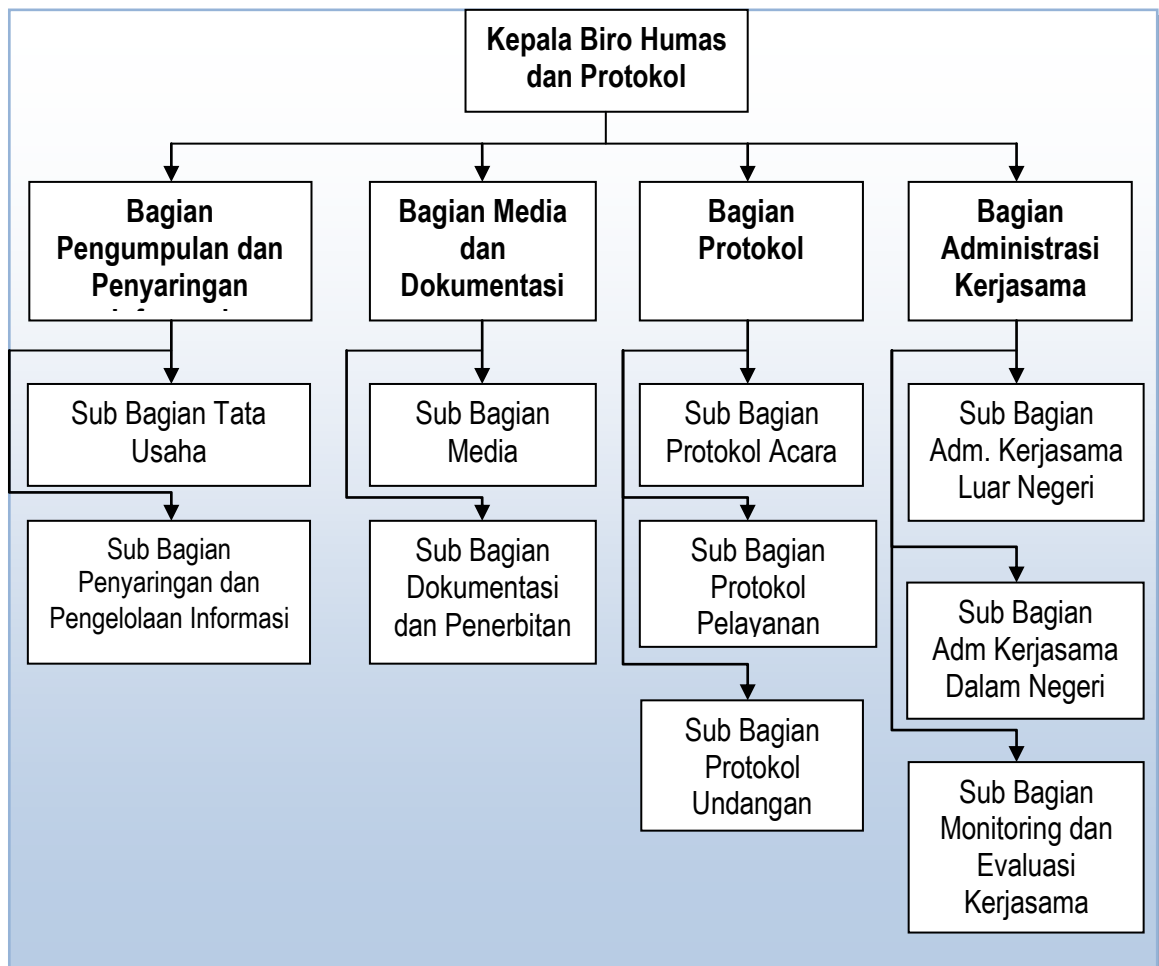
## **E. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Biro Humas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai Berikut :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Penyaringan Informasi;
3. Kepala Bagian Media dan Dokumentasi
  - a. Kepala Sub Bagian Media;
  - b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan;
4. Kepala Bagian Protokol
  - a. Sub Bagian Protokol Acara;
  - b. Sub Bagian Protokol Pelayanan Tamu;
  - c. Sub Bagian Protokol Undangan;

5. Kepala Bagian Administrasi Kerjasama
  - a. Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri;
  - b. Sub Bagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri;
  - c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama;

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jawa Timur sebagaimana bagan berikut:



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur**

## 2.2 Sumber Daya

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah pegawai yang berdasarkan masing-masing komposisi tergambarkan sebagai berikut :

#### A. Jabatan

Dari komposisi pegawai Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur pada Desember Tahun 2017 seluruhnya berjumlah 94 orang, terdiri dari :

- PNS : 77 orang
- PTT-PK : 17 orang

Dengan uraian jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasar Jabatan

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1	Struktural	Eselon II	1
2		Eselon III	4
3		Eselon IV	10
4	Fungsional Tertentu	Keahlian	7
5	Pelaksana	-	55
6	PTT-PK	-	17
<b>Total</b>			<b>94</b>

Data per Juni 2018

#### B. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasar Golongan/Ruang dan PTT-PK

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1
3	Pembina Tk.I	IV/b	1
4	Pembina	IV/a	11
5	Penata Tk.I	III/d	12
6	Penata	III/c	14
7	Penata Muda Tk.I	III/b	19
8	Penata Muda	III/a	15
9	Pengatur Tk.I	II/d	1
10	Pengatur	II/c	2
11	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
12	PTT-PK	-	17
<b>Total</b>			<b>94</b>

Data per Juni 2018



### C. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan PNS dan PTT-PK Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PTT-PK
S 2	20	-
S 1	42	10
D 3	2	1
D 2	-	1
D 1	-	-
SLTA	12	5
SMP	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>17</b>

Data per Juni 2018

### D. Asset/Modal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor :
  - a. Roda 4 : 5 unit
  - b. Roda 2 : 6 unit
2. Mesin/peralatan kantor :
  - a. Komputer : 54 unit
  - b. Printer : 54 unit
3. Lemari, meja/kursi, filling dan lain-lain peralatan kantor :
  - a. Filling : 6 buah
  - b. Lemari besi : 4 buah
  - c. Lemari kayu : 1 buah
  - d. Lemari kaca : 5 buah
  - e. Meja komputer : 4 buah
  - f. In Focus : 3 buah
  - g. Mesin Fax : 4 buah

## 5. Sarana Lain-lain

a. Lemari Es	:	2 buah
b. AC	:	4 buah
c. Video Kamera (handycam)	:	2 unit
d. Kamera	:	6 buah
e. Televisi	:	5 buah
f. Mikrofone	:	3 unit
g. Handy talky	:	24 buah
h. Podium	:	2 buah

## 2.3 Kinerja Pelayanan

### 1. Pelayanan Vertikal

- Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka Kegiatan Kehumasan Keprotokolan, dan Kerjasama;
- Pelayanan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR RI, Menteri dan Pejabat Tinggi Negara (VIP dan VVIP);
- Tamu Kenegaraan dari Negara Sahabat.

### 2. Pelayanan Horizontal

- Pelayanan kepada masyarakat melalui PPID (Penyelenggaraan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi)
- Dinas/Lembaga/Kantor untuk Pelayanan keprotokolan
- Fasilitasi Perizinan dan Administrasi Kerjasama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

### 3. Pelayanan Kemitraan

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan :

- Wartawan Pokja di Jawa Timur
- LSM yang ada di Jawa Timur.
- Bagian Humas dan Protokol Pusat dan Kabupaten/Kota.

### 4. Pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi

- Sosialisasi hasil liputan Kegiatan Gubernur, Wagub, Sekda melalui penerbitan Bulletin Prasetya yang terbit setiap bulan

- b. Informasi Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan dapat diakses <http://birohumas.jatimprov.go.id>.
- c. Penerbitan Kliping bulanan dan tahunan kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda.
- d. Penerbitan Himpunan Pidato Gubernur, Wagub dan Sekda
- e. Penerbitan Himpunan Dokumentasi Foto kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda.
- f. Penayangan Kaledeskop kegiatan Gubernur, Wagub, Sekda di TVRI, RRI dan JTV.
- g. Penayangan di iklan Media elektronik (JTV, Arek TV, Metro dan SBO) layanan masyarakat.
- h. Penayangan potensi dan hasil-hasil pembangunan di TVRI dan Rri
- i. Penerbitan advetorial agenda Gubernur, Wagub dan Sekda di beberapa media cetak (Jawa Pos, Bhirawa, Memorandum, Surya, Seputar Indonesia, Harian Bangsa, Surabaya Post, Surabaya Pagi, Duta Masyarakat dan media cetak lainnya) serta Media On Line
- j. Penerbitan buku Kebijakan Inspiratif Jawa Timur.
- k. Pelayanan Informasi Data melalui Pusdatin.

**Tabel TC 23 Pencapaian Kinerja Biro Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Monitoring isu publik dan evaluasi di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan				-	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	100	100	100	100
2	Himpunan Kliping bulanan				-	-	1.440	1.440	1.440	-	-	1.440	1.440	1.440	-	-	100	100	100
3	Buku Kliping Tahunan				-	-	600	600	600	-	-	600	600	600	-	100	100	100	100
4	Data dan informasi tentang Pimpinan Daerah Gubernur, Wagub, Sekda melalui Media Massa (cetak, elektronika)				-	1440	1440	1440	510	-	1440	1440	1440	510	-	100	100	100	100
45	Data dan informasi melalui Database				-	12	12	12	12	-	12	12	12	12	-	-	100	100	100
6	Pres rilis dan foto				-	-	2160	2160	2160	-	-	2160	2160	2160	-	-	100	100	100
7	Pres Gathering				-	-	24	24	24	-	-	24	24	24			100	100	100
8	Editor Gathering				-	-	24	24	24	-	-	24	24	24			100	100	100
9	Pres Tour				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1			100	100	100
10	LKTW				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1			100	100	100
11	Termonitornya Keg Gubernur, Wagub dan sekda				-	-	5.300	5.300	5.300	-	-	5.300	5.300	5.300			100	100	100
12	Siaran Pres Gubernur, Wagub, Sekda				-	-	724	724	724	-	-	724	724	724			100	100	100
13	Foto				-	-	736	736	736	-	-	736	736	736			100	100	100
14	Majalah Prasetya				-	-	18.000	12.000	12.000	-	-	18.000	12.000	12.000			100	100	100
15	Advetorial				-	-	100	100	100	-	-	100	100	100			100	100	100
16	Kalaedoskop				-	-	9	9	9	-	-	9	9	9			100	100	100

Dari Tabel 2.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi sesuai dengan target, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2019-2024 dapat memberi kontribusi terhadap pelayanan baik kepada masyarakat maupun Pejabat Daerah dan Pejabat Pusat.

**Tabel TC-2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Humas dan Protokol Tahun 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke...					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke.... (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(12)	(13)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50.000.00 0	177.000.0 00	66.000.00 0		31.706. 000	48.439.00 0	12.250.00 0	52.900.00 0		26.400.25 0	96,88	6,92	97		83,27	81.176.500	34.997.313
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:	998.480.0 00			41.000.00 0		900.150.2 55			31.864.00 0		90,15			77,72		519.740.000	466.007.128
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	1.190.000 .000					1.019.047 .180					85,63					1.190.000.000	1.019.047.180
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.	9.964.200 .000	-				9.389.574 .182					94,23	-				4.982.100.000	4.694.787.091
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah /Sekretaris Daerah/Asisten Sekda.	8.445.800 .000	-				6.623.739 .640					78,43	-				8.445.800.000	6.623.739.640
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		674.836.4 00	722.685.4 00	896.689.0 00	1.103.6 22.000		605.450.3 20	662.862.5 56	829.471.8 75	1.060.174 .035	-	89,72	91,72	92,50	96,06	849.458.200	789.489.697
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		150.000.0 00	150.000.0 00	80.000.00 0	75.000. 000		144.544.0 00	133.440.5 00	72.881.00 0	73.735.00 0		96,36	88,96	91,10	98,31	113.750.000	106.150.125
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah		300.000.0 00	150.000.0 00	150.000.0 00	155.37 0.000		165.500.0 00	140.322.0 00	137.485.0 00	147.174.5 00		55,17	93,55	91,66	94,73	188.842.500	147.620.375
Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi.		3.723.838 .000	3.100.158 .650	2.881.160 .000	12.560. 000.00 0		2.955.253 .738	2.630.410 .220	2.632.869 .121	12.180.46 7.682		79,36	85,22	91,38	96,98	5.566.289.163	5.099.750.190
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan.		4.000.830 .000	4.600.158 .650	4.285.651 .120	6.005.5 00.000	-	3.742.981 .234	4.327.641 .896	4.147.624 .992	5.782.115 .596	-	93,56	94,15	96,78	96,28	4.723.034.943	4.500.090.930
Program Peningkatan Kualitas			9.398.050										97,64	94,21			10.609.631.594

Media dan Dokumentasi			.600	12.792.58 6.000				9.167.147 .940	12.052.11 5.248							11.095.318.300	
Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Informasi					3.046.0 71.000					2.933.466 .689					96,30	3.046.071.000	2.933.466.689
Program Peningkatan Kerjasama				3.323.012 .500					2.670.715 .102					80,37		3.323.012.500	2.670.715.102
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama					5.798.3 30.000					5.226.736 .390					90,14	5.798.330.000	5.226.736.390

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur dari tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke 5 (lima) di dalam Renstra tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat penting sebagai Juru Bicara Gubernur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, reorientasi terhadap program Biro Humas dan Protokol Setda ke depan mutlak harus dilakukan dengan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis organisasi, baik program internal maupun program eksternal.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yaitu :

BAGIAN		PERMASALAHAN	
1	Kehumasan	1	Masih kurangnya publikasi kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan Gubernur, Wagub dan Sekda Disampaikan oleh Pemprov kepada Masyarakat Jatim
		2	Belum optimalnya komunikasi dua arah anatar Pemprov Jatim dengan Masyarakat untuk mendapatkan input dari Masyarakat untuk ditindaklanjuti
		3	Masih kurangnya kapasitas SDM untuk layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat
		4	Belum semua media massa memuat siaran pers yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Protokol
2	Keprotokolan	1	Masih kurangnya Jumlah Tenaga Protokol di Pemprov Jatim
		2	Masih sulitnya Koordinasi Bidang Keprotokolan Provinsi dengan Pusat untuk layanan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Sifatnya Mendadak
		3	Terbatasnya SDM Keprotokolan Pemda Kab/Kota dalam Layanan Kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah
		4	Tingginya frekuensi kegiatan/acara di Jawa Timur terutama kedatangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tamu Negara serta kegiatan nasional yang tidak seimbang dengan jumlah petugas protokol, sehingga kegiatan tidak dapat terlayani dengan optimal
3	Kerjasama	1	Belum cepatnya proses administrasi Pengesahan Kerjasama (MoU/NKK) karena terkendala banyaknya agenda kegiatan Gubernur
		2	Masih terbatasnya penguasaan bahasa asing aparat Pemda dalam melaksanakan koordinasi langsung dengan Pihak Lembaga Asing
		3	Masih kurangnya tingkat kesadaran saling berinteraksi antara Pemprov dengan Pemda untuk memenuhi kebutuhan Kerjasama.
4	PPI	1	Terjadi perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Perangkat Daerah bidang kehumasan dan keprotokolan di tingkat Kabupaten/Kota (Implementasi UU 23/2014 dan PP 18/2016);
		2	Terbatasnya tools dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Media, sehingga Monitoring Media baru dapat dilakukan untuk Media Cetak saja;
		3	Keterbatasan SDM untuk ketata usahaan

Dengan **Tujuan : "Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama "** dan Sasaran : "Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama", maka peluang yang menjadi harapan ke depan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

<b>BAGIAN</b>		<b>PELUANG/HARAPAN</b>	
1	Kehumasan	1	Meningkatkan kualitas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kalangan pers.
		2	Mensosialisasikan tentang kinerja Pemprov kepada masyarakat
		3	Mengadakan Bintek SDM untuk layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat
		4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberitaan-pemberitaan positif tentang Jawa Timur di media massa;
2	Keprotokolan	1	Penambahan Jumlah SDM
		2	Mengadakan Bintek Keprotokolan
		3	Meningkatkan koordinasi tentang kegiatan Pejabat Pemerintah Pusat dan Tamu Negara kepada Protokol Pemprov dan Kab/Kota
3	Kerjasama	1	Meningkat koordinasi tentang kegiatan Gubernur
		2	Mengadakan Bintek Bahasa Asing
		3	Mengadakan Bintek Kerjasama
4	PPI	1	Menerapkan dan mengkoordinasikan tentang PP 18/2016 di Biro Humas dan Protokol
		2	Mengadakan Bintek Monitoring Media
		3	Penambahan SDM



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI JAWA TIMUR**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Humas dan Protokol**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, terdapat beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Biro Humas dan Protokol yang kemudian dapat disusun sebagai sebuah isu strategis. Dalam menyusun isu strategis tersebut didasarkan pada hasil analisis visi dan misi Gubernur Jawa Timur, evaluasi kinerja di tingkat Biro dan isu strategis Pelayanan Publik Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024.

Beberapa prioritas isu yang akan dilaksanakan Biro Humas dan Protokol dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik yaitu:

#### **1. Tata Kelola Organisasi**

Pada tahun 2017, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan struktur organisasi, sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63). Perubahan struktur organisasi tersebut menyebabkan adanya penambahan fungsi Administrasi Kerjasama pada Biro Humas dan Protokol struktur, sehingga struktur organisasi Biro Humas dan Protokol tersusun dari 4 (empat) bagian dengan 10 Sub Bagian.

Fungsi administrasi kerjasama merupakan fungsi strategis yang diamanahkan kepada Biro Humas dan Protokol dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, termasuk antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi di luar negeri, antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi di Indonesia, maupun antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lembaga-lembaga publik di luar negeri dan di Indonesia. Fungsi Administrasi Kerjasama tersebut juga ditujukan untuk memberikan fasilitasi perizinan perjalanan dinas keluar negeri bagi pejabat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja seluruh komponen/personel Biro Humas dan Protokol mutlak dilakukan, dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik.

Biro Humas dan Protokol memiliki peran strategis dalam mempersiapkan Jawa Timur menghadapi MEA. Sebab seluruh kebijakan dan program/kegiatan Gubernur Jawa Timur khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan menghadapi MEA harus mendapat perhatian serius dan tersebar secara luas kepada masyarakat Jawa Timur, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dan mampu memanfaatkan peluang-peluang pengembangan kompetensi yang bersumber dari informasi kebijakan/program/kegiatan Gubernur Jawa Timur yang tersebarluas di masyarakat.

Instansi Pemerintah dituntut agar setiap pimpinan dan seluruh pegawainya dapat menunjukkan tindakan yang terpuji kepada *stakeholder* dan dapat bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola instansi. Guna meningkatkan kinerja instansi kearah yang lebih baik, maka instansi pemerintah harus dikelola secara professional dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Tata Kelola Yang Baik).

Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar praktek-praktek *good governance* menjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya. Prinsip *Good Governance* merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya adalah dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan meliputi hal-hal sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban dan Kewajaran. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program penataan Administrasi Tata Kelola dan kepegawaian. Misal dengan mengontrol dan mengevaluasi capaian kinerja pegawai dengan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2013.

## **2. Pengembangan Infrastruktur**

Infrastruktur sebagai komponen utama pendukung terlaksananya program kerja sebuah instansi pemerintah. Dalam kegunaan dalam aplikasi lain, infrastruktur dapat merujuk pada teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal serta alat-alat pengembangan perangkat lunak, jaringan sosial politik atau kepercayaan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah instansi pemerintah dengan kepentingan umum. Sehingga infrastruktur pada organisasi dan instansi pemerintah sering disebut sebagai prasarana dan sarana.

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki Prasarana dan Sarana sebanyak 255 unit yang terbagi ke dalam 48 jenis barang, jumlah ini masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah pengguna (pegawai) di Biro Humas dan Protokol sebanyak 94 orang (77 PNS dan 17 PTT). Maka guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur harus terus dikembangkan dan dipelihara sesuai dengan kegunaannya.

### **3. Peningkatan kompetensi SDM**

Kata "kompetensi" memiliki pengertian menyoroti aspek dan penekanan yang relatif berbeda. Kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan capability (kemampuan). Seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari "*rule government*" menjadi "*good governance*" atau "*from government to governance*", dari sentralistik ke desentralistik, maka perlu disikapi dan diimbangi dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Sumbedayaya Manusia (SDM) lainnya pada instansi pemerintah yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Keberadaan PNS di era reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh pegawai di dalamnya.

Jumlah pegawai pada Biro Humas dan Protokol sebanyak 94 orang yang terdiri dari 77 PNS dan 17 PTT, jumlah ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian kerja :

- (a) Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi sebanyak 17 pegawai;
- (b) Bagian Protokol sebanyak 31 pegawai; dan
- (c) Bagian Media dan Dokumentasi sebanyak 26 pegawai.;
- (d) Bagian Administrasi Kerjasama sebanyak 20 Pegawai

Kebijakan penugasan pegawai di Biro Humas dan Protokol pada masing-masing bidang disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan kerja yang dimiliki oleh pegawai tersebut,

sehingga masing-masing pegawai berada pada tempat yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Namun, seiring dengan perkembangan tuntutan kinerja dan perkembangan regulasi sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Maka, pengembangan SDM Pegawai di Biro Humas dan Protokol mutlak dilakukan, baik secara kuantitas dan analisis jabatan maupun kualitas melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Sehingga kuantitas kerja dapat terpenuhi dan kualitas kinerja pegawai Biro Humas dan Protokol dapat terus meningkat.

#### **4. Peningkatan Mutu dan Daya Saing**

Mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan. Definisi lain menyatakan bahwa mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus menerus. Dalam hal ini berarti mutu berarti sesuatu yang kontinu, senantiasa ada perbaikan, tidak stagnan.

Dalam kajian penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, mutu berarti kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik *stakeholder* internal maupun eksternal. Kepuasan *stakeholder* internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan eksternal. Sehingga perbaikan dan peningkatan mutu internal instansi pemerintah dibutuhkan sebagai upaya menjamin peningkatan mutu eksternal.

Dampak langsung dari terjaminnya peningkatan mutu pada sebuah instansi pemerintah adalah kuatnya daya saing pemerintah itu sendiri beserta seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalamnya, termasuk apabila mutu kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Jawa Timur terus meningkat maka daya saing Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang Kehumasan, Penyebaranluasan Informasi Publik dan Tata Keprukolan akan semakin kuat. Secara tidak langsung, kuatnya daya saing bidang-bidang khusus tersebut akan menjadi daya ungit bagi bidang-bidang lainnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Upaya Peningkatan Mutu dan Penguatan Daya Saing pada Biro Humas dan Protokol merupakan komitmen yang harus dilakukan, baik melalui penataan Administrasi Tata Kelola dan tata laksana organisasi maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Dari keempat isu besar tersebut akan diterjemahkan secara spesifik kedalam 4 bidang yaitu; (a) Manajemen dan Tata Kelola (b) Prasarana/sarana, (c) Sumber Daya Manusia dan (d) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun kondisi umum Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan 4 (empat) bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen dan Tata Kelola
  - 1. Adanya Dukungan dan komitmen pimpinan
  - 2. Tersedia dan terpenuhinya anggaran operasional
  - 3. Tersedianya tata aturan kehumasan dan keprotokolan
  - 4. Belum optimalnya sistem administrasi dan penilaian kinerja pegawai
- b. Prasarana/Sarana
  - 1. Sarana Prasarana belum memadai
  - 2. Akses media komunikasi dan informasi melalui internet dan media cetak
- c. Sumber Daya Manusia
  - 1. Jumlah pegawai cukup
  - 2. Kompetensi pegawai rendah
  - 3. Adanya konsultan khusus dari kalangan pers
  - 4. Tidak adanya tenaga kurir khusus
- d. Inovasi Pelayanan Publik
  - 1. Perlunya Peningkatan kualitas pelayanan publik
  - 2. Sering berubahnya jadwal acara
  - 3. Implementasi Teknologi Informasi terintegrasi

### 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan budaya masyarakat Jawa Timur, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya perencanaan program yang baik sebagai penjabaran dari visi Gubernur tersebut. Sehingga perlu disusun perencanaan yang baik dan didukung oleh data/informasi yang tepat. Oleh karena itu Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur mempunyai peran strategis sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik;
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi serta melaksanakan komunikasi publik kepada masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Keprotokolan bagi Pimpinan, Pejabat Negara dan Tamu Kenegaraan yang berkunjung ke Jawa Timur;
4. Meningkatkan Kualitas Administrasi Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak-pihak dalam maupun luar negeri.

### 3.3 Penentuan Isu Strategis

Dari kondisi umum Biro Humas dan Protokol tersebut kemudian dapat dipetakan menjadi Kekuatan (Strenght), Peluang (Oportunity), Kelemahan (Weakness) dan Tantangan (Trhead) dengan matriks sebagai berikut:

#### ANALISIS SWOT KONDISI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

<div>KONDISI INTERNAL</div> <div>KONDISI EKSTERNAL</div>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dan komitmen pimpinan</li> <li>2. Tersedianya tata aturan kehumasan dan keprotokolan</li> <li>3. Jumlah pegawai cukup</li> <li>4. Adanya konsultan khusus dari kalangan pers</li> <li>5. Tersedianya Sistem Kumpulan Database Informasi Kehumasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sistem administrasi dan penilaian kinerja pegawai</li> <li>2. Sarana Prasarana belum memadai</li> <li>3. Kompetensi pegawai rendah</li> <li>4. Tidak adanya tenaga kurir khusus</li> <li>5. Sering berubahnya jadwal acara</li> </ol>
<b>PELUANG (O)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dan terpenuhinya anggaran operasional</li> <li>2. Kemudahan akses media komunikasi dan informasi melalui internet dan media cetak</li> </ol>	<p>(S1,O1) : Penyusunan anggaran sesuai kebutuhan secara proporsional berdasarkan arahan pimpinan</p> <p>(S2,O2) : Penyusunan SOP Kejadian Luar Biasa Keprotokolan</p> <p>(S3,O1) : Restrukturisasi pegawai sesuai kompetensi</p> <p>(S4,O2) : Pembuatan terbitan berkala melalui internet dan cetak.</p> <p>(S4,O2) : Pembinaan hubungan baik dengan perusahaan pers</p>	<p>(W2,O1) : Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kekurangan sarana prasarana</p> <p>(W3,O1) : Penyelenggaraan pelatihan kompetensi SDM Kehumasan dan Keprotokolan</p> <p>(W4,O1) : Penambahan tenaga <i>outsourcing</i> Khusus Kurir</p>
<b>TANTANGAN (T)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>2. Implementasi Teknologi Informasi terintegrasi</li> </ol>	<p>(S1,T1,T2) : Pembangunan <i>frontpage</i> Sistem Kumpulan Database Informasi guna penyebaran informasi kehumasan</p>	<p>(W1,T2) Pembangunan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>(W5,T2) Penyediaan Media Khusus berupa Sistem Informasi Agenda Kegiatan Gub/ Wagub/Sekda berbasis mobile</p>

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut:

No	Matriks	Isu Strategis	Kelompok Tujuan
1	(S1,O1)	Penyusunan anggaran sesuai kebutuhan secara proporsional berdasarkan arahan pimpinan	Penguatan Kualitas Layanan Administrasi Tata Kelola
2	(S2,O2)	Penyusunan SOP Kejadian Luar Biasa Keprotokolan	
3	(S3,O1)	Restrukturisasi pegawai sesuai kompetensi	
4	(W4,O1)	Penambahan tenaga <i>outsourcing</i> Khusus Kurir	
5	(W2,O1)	Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kekurangan sarana prasarana	
6	(W1,T2)	Pembangunan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai	
7	(S1,T1,T2)	Pembangunan <i>frontpage</i> Sistem Kumpulan Database Informasi guna penyebarluasan informasi kehumasan	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama
8	(S4,O2)	Pembuatan terbitan berkala melalui internet dan cetak.	
9	(S4,O2)	Pembinaan hubungan baik dengan perusahaan pers	
10	(W3,O1)	Penyelenggaraan pelatihan kompetensi SDM Kehumasan dan Keprotokolan	
11	(W5,T2)	Penyediaan Media Khusus berupa Sistem Informasi Agenda Kegiatan Gub/Wagub/Sekda berbasis mobile	

Dari 11 isu strategis yang dihadapi Biro Humas dan Protokol dapat disederhanakan menjadi 2 (dua) Kelompok Tujuan Biro Humas dan Protokol:

1. Penguatan Kualitas Layanan Administrasi Tata Kelola.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat 13 UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Misi Gubernur Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut :

1. Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, maupun antar wilayah;
2. Terciptanya "kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memerhatikan kelompok masyarakat yang rentan";
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan;
4. Kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah;
5. Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris;
6. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinnekaan;
7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk Menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang hubungan masyarakat, tugas-tugas keprotokolan dan administrasi kerjasama. Adapun Biro Humas dan Protokol mendukung Misi Kelima Gubernur Jawa Timur dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka Dan Partisipatoris.

Guna menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan publik, baik kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah



maupun masyarakat umum, maka Biro Humas dan Protokol menentukan tujuan dan sasaran strategis dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan informasi berupa agenda dan berita Kegiatan Pejabat (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah) kepada publik yang memerlukan.
- b. Memberikan layanan informasi potensi dan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa berita yang dimuat di media massa, cetak dan elektronik, penerbitan buletin, buku, foto untuk disampaikan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah/ Pusat serta pihak yang memerlukan informasi.
- c. Memberikan pelayanan keprotokolan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata acara resmi kenegaraan.
- d. Memberikan pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Penelaahan Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Maka, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) sasaran.

- a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.
- b. Sasaran : Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

Sasaran sebagaimana dimaksud memiliki lima indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)
3. Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)
4. Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)
5. Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Biro Humas dan Protokol (IKM)

Adapun hubungan (matriks) Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta penetapan target untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel TC 25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Humas Dan Protokol**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Target dokumen analisis isu publik yang disebarluaskan terhadap Realisasi isu pulik yang disebarluaskan (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Target kepuasan masyarakat penerima produk informasi (SKM) terhadap masyarakat penerima produk informasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keprotokolan (SKM) (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terdokumentasikan terhadap kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terdokumentasikan	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- a. Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi
- a. Birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
- b. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Rencana Program dan Kegiatan Biro Humas Dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel TC 26 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.
- Misi : Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka dan Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
			Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan
			Meningkatkan Kompetensi Pegawai
		Meningkatkan ketersediaan dan layanan informasi untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat umum	Meningkatkan kualitas monitoring media cetak
		Memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai pusat layanan informasi kehumasan	Mengembangkan website portal berita kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
		Menjaga hubungan baik dengan perusahaan pers dan kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kuantitas penyebaran informasi	Menyelenggarakan Pers Gathering, Editor Gathering, Pers Tour dan Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW)
			Melakukan Koordinasi Intensif dengan bagian kehumasan kabupaten/ kota se-Jawa Timur
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kunjungan Kerja Pejabat Negara	Memberikan Pelayanan Keprotokolan dan Fasilitas Kunjungan Kerja Pejabat Negara ke Jawa Timur
			Melakukan Koordinasi Intensif dengan bagian Keprotokolan kabupaten/ kota se-Jawa Timur
		Meningkatkan Kualitas Administrasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri serta Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama	Melakukan Koordinasi intensif dengan OPD Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan Pihak-pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Biro Humas dan Protokol tertuang di tabel TC 27.

**Tabel TC 27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jatim**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							0		0		0		0		0		0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokol an dan Kerjasama	Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokol an dan Kerjasama	xxx01	Program Pelayanan Kesekretariatan Biro Hubungan Masyarakat dan protokol	Persentase Masyarakat/ Aparatur yang puas terhadap pelayanan administrasi	96,06	100 %	2.195.340.800	100%	1.047.900.000	100 %	1.060.000.000	100 %	1.115.000.000	100 %	1.175.000.000	100 %	6.593.240.800	Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jatiom	Jawa Timur
		xxx01019	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Biro Humas	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Biro Humas	96,06	100 %	40.310.000	100%	37.800.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	50.000.000	100 %	213.110.000		
		xxx02	Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Humas dan Protokol	Jumlah Laporan Keuangan dan Pelayanan Administrasi Keuangan	98,31	100 %	23.941.600	100%	16.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	25.000.000	100 %	104.941.600		

		xxx0201 2	Ketatausahaan dan Kepegawaian Biro Humas dan Protokol	Jumlah Surat Keluar dan surat masuk yang teragendakan	99,99	100 %	2.131.089.200	100%	994.100.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.050.000.000	100 %	1.100.000.000	100%	6.275.189.200		
		30343	<b>Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi</b>	Prosentase Berita dan Isu Publik Pemerintahan Prov Jatim yang di Monitoring dan Diolah	96,3	100 %	<b>5.871.608.000</b>	100%	<b>7.064.433.000</b>	100 %	<b>7.200.600.000</b>	100 %	<b>7.270.000.000</b>	100 %	<b>7.610.521.000</b>	100%	<b>35.017.162.000</b>	Jawa Timur	
		3034300 1	Monitoring Media Massa dan Analisis Berita serta Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Jumlah Buku Himpunan Dokumen Monitoring Media yang disebarluaskan	96,53	100 %	1.751.700.000	100%	1.623.800.000	100 %	1.680.600.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.733.600.000	100%	8.489.700.000		
		3034300 2	Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi serta Penyebarluasan Informasi Pendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Data / Informasi yang tersedia pada pusat Data/ Informasi kehumasan dan keprotokolan	98,03	100 %	1.524.805.000	100%	1.240.500.000	100 %	1.250.000.000	100 %	1.270.000.000	100 %	1.393.000.000	100%	6.678.305.000		
		3034300 3	Pengendalian dan Evaluasi Ketersediaan Informasi serta Sumber Daya Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Kehumasan dan KegPeningkatan SDM	92,56	100 %	2.595.103.000	100%	4.200.133.000	100 %	4.270.000.000	100 %	4.300.000.000	100 %	4.483.921.000	100%	19.849.157.000		
		30344	<b>Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi</b>	Perentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	98,03	100 %	<b>11.190.414.500</b>	100%	<b>11.283.200.000</b>	100 %	<b>11.400.000.000</b>	100 %	<b>11.451.510.000</b>	100 %	<b>11.600.000.000</b>	100%	<b>56.925.124.500</b>		Jawa Timur

		3034400 1	Penyebarluasan Informasi serta Pembinaan dan Keikutsertaan dengan Lembaga Pers	Jumlah Perusahaan /Lembaga Pers yang Menjalinkan Kerjasama dengan Biro Humas dan Protokol	92,56	100 %	7.390.242.000	100%	7.449.000.000	100 %	7.470.000.000	100 %	7.480.000.000	100 %	7.500.000.000	100%	37.289.242.000		
		3034400 2	Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia	Jumlah hasil Olah Konten Dokumentasi kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda	96,98	100 %	2.496.960.000	100%	2.521.900.000	100 %	2.580.000.000	100 %	2.600.000.000	100 %	2.650.000.000	100%	12.848.860.000		
		3034400 3	Penerbitan dan Penyebarluasan produk-produk kehumasan	Jumlah Produk Informasi/ Dokumentasi yang Diterbitkan dan Disebarluaskan	92,74	100 %	1.303.212.500	100%	1.312.300.000	100 %	1.350.000.000	100 %	1.371.510.000	100 %	1.450.000.000	100%	6.787.022.500		
		30345	<b>Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Adm Kerjasama</b>	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan	90,14	100 %	<b>5.199.408.000</b>	100%	<b>5.257.430.000</b>	100 %	<b>5.356.774.000</b>	100 %	<b>5.356.774.000</b>	100 %	<b>5.641.474.000</b>	100%	<b>26.811.860.000</b>		Jawa Timur
		3034500 1	Hubungan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang tersusun	87,94	100 %	3.004.892.000	100%	3.030.900.000	100 %	3.050.000.000	100 %	3.050.000.000	100 %	3.215.994.000	100%	15.351.786.000		
		3034500 2	Hubungan Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang tersusun	94,44	100 %	1.240.000.000	100%	1.252.030.000	100 %	1.300.774.000	100 %	1.300.774.000	100 %	1.371.750.000	100%	6.465.328.000		

		3034500 3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Adm Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	93,61	100 %	954.516.000	100%	974.500.000	100 %	1.006.000.000	100 %	1.006.000.000	100 %	1.053.730.000	100%	4.994.746.000		
		30387	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan	96,28	100 %	10.707.281.700	100%	10.874.320.000	100 %	10.990.000.000	100 %	11.025.000.00 0	100 %	12.035.005.000	100%	55.631.606.700		Jawa Timur
		3038700 3	Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wagub, Sekda dan Asisten	95,78	100 %	7.819.019.100	100%	7.950.000.000	100 %	8.000.000.000	100 %	8.000.000.000	100 %	8.825.000.000	100%	40.594.019.100		
		3038700 4	Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	98,42	100 %	1.599.564.000	100%	1.614.050.000	100 %	1.640.000.000	100 %	1.650.000.000	100 %	1.780.005.000	100%	8.283.619.000		
		3038700 5	Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan	Jumlah Permintaan Undangan resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	94,66	100 %	1.288.698.600	100%	1.310.270.000	100 %	1.350.000.000	100 %	1.375.000.000	100 %	1.430.000.000	100%	6.753.968.600		



## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024 ini adalah merupakan perubahan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Dokumen Perencanaan ini mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 serta sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Harapan yang ingin dicapai Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tujuan yang direncanakan yaitu;

#### ***Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama***

dengan Sasaran :

#### ***Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama***

Demikian gambaran Rencana Strategis Biro Humas dan Protokol Setda Jawa Timur Tahun 2019 - 2024. Rencana Strategis ini akan mendasari perencanaan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Biro Humas dan Protokol Setda Jawa Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensi Biro Humas dan Protokol Setda Jawa Timur dalam mencapai tujuannya.

Renstra Biro Humas dan Protokol Setda Jawa Timur ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Humas dan Protokol Setda Jawa Timur selama Lima tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2024, dan diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dengan insan pers dan masyarakat dalam mendukung kegiatan Kepala Daerah.

Renstra Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur ini selanjutnya merupakan alat manajemen untuk pengendalian melalui monitoring dan evaluasi kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur yang terususun dalam :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP;
2. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD); dan
3. Laporan-laporan kinerja lainnya.

Tentunya semua hal yang diagendakan dalam perubahan rencana strategis ini tidak akan bisa berjalan baik apabila tidak didukung kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang terkait, baik dari unsur pimpinan maupun staf.

Mudah-mudahan apa yang termuat dalam perubahan rencana strategis ini dapat bermanfaat . Aamiin.

Surabaya, Mei 2019

**Kepala Biro Humas Dan Protokol**



**ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199511 1 001